

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
GUWOSARI KABUPATEN BANTUL

Pada bagian bab pembahasan ini penulis mencoba memaparkan hasil penelitian terkait dengan “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Guvosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun 2018”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa Guvosari. Dalam isi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa tata kelola pemerintah desa harus berlangsung akuntabel. Hal ini dapat dilihat bahwa aspek partisipasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses pembangunan di Desa.

Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data lengkap dan representatif baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Pada tahapan wawancara narasumber yang dipilih yaitu merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi atau data-data yang akuntabel dan memiliki kedudukan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam bab ini ada sub pembahasan untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Guvosari, yang dapat dibagi sebagai berikut : a. Partisipasi Masyarakat dalam tahap perencanaan; b. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan; c. Partisipasi Masyarakat dalam tahap evaluasi.

Reformasi menjadi era dimana kedudukan desa bersifat otonom. Desa yang memiliki wewenang lebih untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Desa memiliki hak penuh untuk mengelola keuangan Desa untuk menjalankan program-program. Dijelaskan dalam UU No 16 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa sebagai daerah otonom memiliki wewenang yaitu, kewenangan berdasarkan lokal bersekala Desa, Kewenangan berdasarkan asal usul, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, baik itu dari Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan program pembangunan Desa Guwosari yang sudah tersusun dalam RKP (Rencana Program Kegiatan) Desa Tahun 2019 sepenuhnya memiliki dasar yang merujuk pada berbagai permasalahan yang ada, yang pada akhirnya skala prioritas program pembangunan untuk masa yang akan datang diharapkan pada saat pelaksanaan pembangunan nantinya betul-betul berjalan efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama pada sektor peningkatan keberpihakan pembangunan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Adapun Prioritas Program, kegiatan dan Anggaran yang di kelola Desa Guwosari Tahun 2019 yang disusun dalam RKP (Rencana Program Kegiatan) sepenuhnya didasari pada rumusan prioritas masalah. Sehingga hal prioritas program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya berjalan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk implementasi Undang-undang Desa tersebut tentu perlu adanya partisipasi dari seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi elemen yang sangat penting dalam hal mempengaruhi keberhasilan suatu program

pembangunan untuk pengembangan masyarakat di Desa. Tahapan pembangunan desa ini berlandaskan pada UU Desa pasal 78, yang didalamnya dijelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam pembangunan di suatu Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi.

3.1 Rencana Program Kegiatan Tahun 2019 Desa Guwosari

Pembangunan di Desa Guwosari ditetapkan oleh Desa sendiri sebagai suatu daerah otonom. Adapaun prioritas pembangunan di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa.

- Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa
- Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa
- Jaminan sosial bagi luraha dan perangkat Desa
- Operasional pemerintah desa
- Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
- Operasional Badan Permusyawaratan Desa
- Operasional rt
- Tunjangan hari raya bagi lurah dan pamong atau perangkat Desa
- Tunjangan akahir masa jabatan
- Pengisian staf honorer khusus IT
- Pengisian dan Pelantikan pamong (Kasi Kesejahteraan)

b. Sub bidang sarana dan prasarana Pemerintah Desa.

- Pemeliharaan Gedung Kantor

- c. Sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan.
 - Updating kependudukan
 - Penyusunan Monografi Desa
 - Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa
 - Penyusunan / Pemutakhiran Profil Desa
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - Penyelenggaraan Musrenbangdes
 - Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - Penyelenggaraan Musyawarah Dusun
 - Penyusunan dan Penetapan RKPDesa
 - Penyusunan dan penetapan RPJMDesa
 - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/perlur)
 - Penyusunan APBDes
 - Penyusunan Perubahan APBDesa
 - Public Hearing Reperdes
 - Sosialisasi Produk Hukum Desa
 - Penyusunan LPPD dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran
 - Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan
 - Pengelolaan/Administrasi/Inventaris kekayaan/Aset Desa
 - Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - Penyelenggaraan lomba kebersihan lingkungan antar pedukuhan
 - Dukungan pengiriman kontingen dalam lomba
 - Riview RKPDesa
- e. Sub Bidang Pertanahan
 - Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa/Dusun
 - Pengelolaan Tanah Desa

- Intensifikasi PBB

2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa (Bidang Pelaksanaan Pembangunan)

a. Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/TPA
- Penyelenggaraan TPQ/TPA
- Pelatihan PAUD tingkat lanjut
- Pengelolaan perpustakaan milik desa
- Dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi
- Dukungan pendidikan bagi perangkat desa
- Dukungan pendidikan bagi anak yatim piatu

b. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan posyandu, balita & lansia
- Fasilitas desa siaga
- Pengadaan sarana dan prasarana posyandu, balita dan lansia
- Penyukuhan kesehatan
- Promosi kesehatan
- Fasilitasi kegiatan KPM PKH
- Fasilitas bina keluarga balita
- Pendataan KK miskin
- Penanggulangan stunting
- Fasilitas kampung KB

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pembangunan lapangan olah raga
- Penyempurnaan gedung kelembagaan
- Rehab MCK kios Sindon
- Pembangunan kios (Sindon)
- Rehab GOR sindon

- Pembangunan TPS
 - Pemeliharaan saluran irigasi atau angkat walet (Bulak dukuh, kadisono dan kalakijo)
 - Pembangunan jalan desa (timur LP Pajangan)
 - Pembangunan kelengkapan Gd. Serbaguna
 - Perbaikan gorong-gorong dan selokan
 - Pembangunan drainase
 - Pembangunan kantor ramah difabel
 - Pengerasan jalan dan rabat beton
 - Pembangunan tugu icon wisata
 - Penerangan jalan
- d. Sub bidang kawasan pemukiman
- Pembangunan rumah tidak layak huni
 - Pembangunan jaringan air bersih
 - Jambanisasi
 - Pembangunan IPAL
 - Pembangunan resapan air hujan
- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika
- Penyelenggaraan informasi publik desa
- f. Sub Bidang Parawisata
- Penembangan wisata alam (sepanjang sungai bedog)
 - Pembentukan pokdarwis Desa

3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2019 adalah :

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
- Penyelenggaraan pos keamanan desa (jadwal ronda)
 - Penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum
 - Fasilitas tim penganggulangan kemiskinan desa dan pedukuhan

- Peningkatan kesehatan masyarakat melalui PSN
 - Penguatan dan peningkatan fasilitas Linmas
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- Pembinaan kaum rois dan pemuka agama di Desa
 - Penyelenggaraan/perayaan hari besar keagamaan
 - Penyelenggaraan/perayaan hari jadi Desa
 - Penyelenggaraan grebeg selarong
 - Penyelenggaraan/perayaan hari jadi Kabupaten Bantul
 - Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah dan seni keagamaan
 - Gebyar lomba PKK
 - Pelatihan karawitan
 - Pelatihan MC bahasa jawa
 - Pengembangan, pembinaan dan fasilitas keagamaan
- c. Sub bidang kepemudaan dan keolahragaan
- Pembinaan kegiatan Olah raga
 - Penyelenggaraan kompetensi olah raga
 - Pembinaan karang taruna
 - Penyelenggaraan senam kesehatan jasmani
 - Fasilitas kegiatan IMP (Institut Masyarakat Pedesaan)
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- Pembinaan LPMD
 - Pembinaan PKK
 - Pembinaan Gapoktan
 - Pelatihan/peningkatan kapasitas LKD
 - Pelaksanaan jam belajar Masyarakat
 - Fasilitas desa budaya
 - Sarasehan
 - Fasilitas kegiatan kesiapsiagaan bencana

- Fasilitas kegiatan gotong royong masyarakat

4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 :

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - Pelatihan budidaya dan ikan darat
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Perternakan
 - Pelatihan pertanian hidroponik
 - Pelatihan pembinaan kambing
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
 - Pendampingan, Pelatihan dan Pemberdayaan bagi warga difabel/Pyandang cacat
 - Pelatihan batik atau lukis kaos
 - Pelatihan dan pemberdayaan kelompok wanita tani
 - d. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa
 - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - Pelatihan pemanfaatan dan pengelolaan sampah
 - Pelatihan sablon
 - Pelatihan pembuatan bio gas
 - Pelatihan kewirausahaan
 - Pelatihan – pelatihan
 - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - Penyertaan modal BUMDesa
 - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - Pengenalan produk unggulan Desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- Penanggulangan bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - Keadaan Darurat
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Keadaan Mendesak

2.5 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di Kelola Desa Sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten.

Dalam hal ini program prioritas pembangunan skala kecamatan atau kabupaten adalah program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Guwosari, akan tetapi pemerintah desa tidak mampu untuk melaksanakan program tersebut. Hal ini dikarenakan ada penyebab yaitu yang pertama disebabkan kegiatan tersebut secara peraturan perundang-undangan bukan wewenang Desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedianya secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Didasari dengan beberapa pertimbangan, maka prioritas program pembangunan di Desa Guwosari tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa Guwosari yang melalui tahapan dan proses secara partisipatif pada forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Adapun kegiatan yang menjadi daftar usulan RKP yaitu :

- a. Pengaspalan jalan Karangber – Kembanggede
- b. Pembangunan gorong-gorong dan talud jalan iroyudan
- c. Pengaspalan jalan Watugedug – Kentolan Lor
- d. Pembangunan talud Sungai Bedog
- e. Pembangunan selokan sepanjang jalan Kentolan Kidul

- f. Pengerasan Jalan Iroyudan – Bungsing
- g. Pembangunan Telaga Desa Pangeran Diponegoro di Dukuh

Maka dari itu pelaksanaan program pembangunan membutuhkan adanya partisipasi seluruh lapisan elemen masyarakat yang dapat dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

2.5 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan Pembangunan Desa

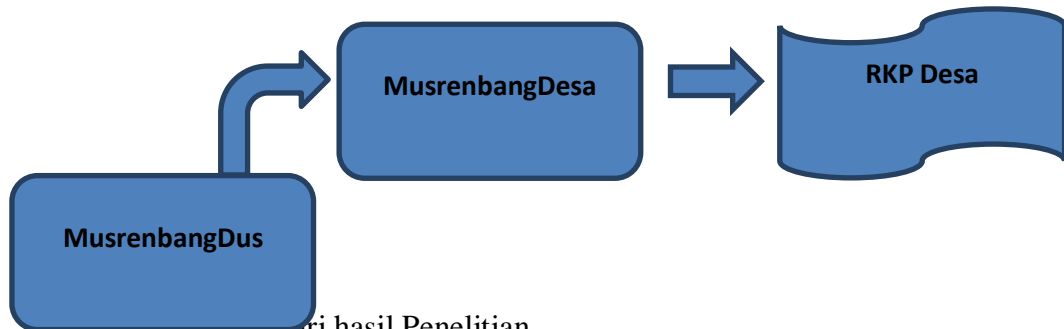
Tahapan perencanaan adalah proses yang sangat penting dalam pelaksanaan perumusan kegiatan pembangunan Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka sudah tentu jelas hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat serta tidak akan optimal dalam tujuan arah pembangunan. Dalam hal ini tahapan perencanaan menjadi faktor yang sangat penting untuk benar-benar dilaksanakan untuk terciptanya program atau kebijakan yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat serta menjadi kewajiban sebelum melaksanakan suatu pembangunan di Daerah.

Perencanaan memiliki peran penting untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan Desa. Tingkat partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari keikutsertaan masyarakat dalam berbagai hal pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ada banyak bentuk atau pola partisipasi masyarakat itu sendiri, contohnya saja bisa berupa dalam tenaga atau buah fikir dan gagasan. Maka dari itu keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ini menjadi hal yang sangat penting dalam kunci keberhasilan pembangunan.

Berikut ini adalah gambar proses tahapan perencanaan di Desa Guwosari :

Gambar 3.3

Proses Perencanaan di Desa Guwosari



Sumber : Diolah dari hasil Penelitian

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Guwosari. Partisipasi ini dimulai dari arus paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat dukuh atau pedukuhan yang biasa disebut dengan musrenbangdus. Dalam forum ini dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat wilayah pedukuhan. Kegiatan musrenbangdus tersebut masyarakat membahas mengenai berbagai sektor dan bidang untuk masing-masing pedukuhan agar dapat menghasilkan program kegiatan yang akan dirumuskan dalam perencanaan pembangunan. Hasil dari forum tersebut proram yang dirumuskan dalam musrenbangdus tersebut akan dibahas kembali dan disampaikan pada forum musrenbangdes ditingkatan Desa untuk melahirkan program prioritas mana saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya partisipasi masyarakat ditingkat pedukuhan, seperti yang disampaikan langsung oleh bapak Masduki Rahmad S.IP selaku Kepala Desa Guwosari dalam wawancara pada tanggal 22/08/19 :

“Program pembangunan dalam proses tahapan perencanaan perumusan program prioritas itu berasal dari masyarakat ditingkat bawah yaitu pedukuhan, maka dari itu forum Musrenbangdus ini menjadi kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan disetiap pedukuhan. Hal ini semua masyarakat dapat menyampaikan seluruh aspirasinya, apa yang menjadi sebuah kebutuhan untuk kemajuan dan kesejahteraan

masyarakat setempat. Setelah musrenbangdus selesai yang maka kami akan merekap lalu membuat draft khusus yang berisikan inisiasi-inisiai hasil dari musrenbangdus itu yang nantinya akan disampaikan pada musrenbangdes di tingkat kelurahan. Pada akhirnya semua usulan masyarakat akan ditampung terlebih dahulu lalu nanti akan diimplementasikan menurut skala prioritas”

Hal tersebut dilakukan melalui proses partisipatif dengan melibatkan semua unsur elemen masyarakat pedukuhan sehingga aspirasi kebutuhan masyarakat antinta dapat betul-betul terdata dengan baik. Informasi hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebul penyusunan RKPDes dan RPJMDes di Desa Guwosari dilakukan dengan cara menampung setiap usulan dan gagasan muai pada tingkatan pedukuhan. Musyawarah di tingkat dusun biasanya diwakili oleh perwakilan dari masing-masing RT dan lembaga kemasyarakatan ditingkat dukuh. Perwakilan RT mewadahi aspirasi kesepakatan RT dalam perkumpulan warga sehingga musyawarah dusun menjadi respersentatif warga pedukuhan.

Hasail musyawarah Dusun (Musdus) direkap dan diserahkan kepada kepala desa Adapun beberapa usulan hasil dari beberapa dukuh seperti nampak pada Tabel dibawah ini :

3.2 Tabel Usulan Prioritas Hasil dari masing-masing Dusun		
No.	Dusun	Usulan dari Dusun
1.	Karangber	Pembangunan Pengaspalan Jalan
2.	Watugedug	Pembangunan Pengaspalan Jalan
3.	Gandekan	Pembangunan Talud Sungai Bedog
4.	Kentolan Kidul	Pembangunan Selokan Jalan
5.	Dukuh	Pembangunan Telaga Desa Diponegoro
6.	Iroyudan	Pembangunan gorong-gorong dan talud jalan

7.	Bungsing	Pengerasan Jalan
8.	Kentolan lor	Pembangunan Pengaspalan jalan
9.	Pringgading	Pembangunan darainase, Jalan Pemukiman

Sumber : Data sekunder, 2019 dan hasil dari wawancara

Setelah hasil pendataan rekapitulasi usulan program prioritas disampaikan langsung ke Kepala Desa untuk dijadikan bahan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Kemudian kepala Desa menyampaikan berkas tersebut ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dalam musyawarah desa dengan memfokuskan pada arah pembangunan di Desa, perencanaan pembangunan desa yang dilakukan secara proses partisipatif dan demokratis.

Ada perbedaan keterwakilan antara musdus dengan musdes, musdus biasanya dihadiri oleh unsur masyarakat yang ada dipedukuhan masing-masing, sedangkan untuk Musyawarah Desa pesertanya yaitu tokoh masyarakat, para kepala dukuh, ketua LPMD, ketua Karang Taruna, Ketua PKK dan lain sebagainya. adapun daftar peserta MusrenbangDes seperti pada Tabbel dibawah ini :

Tabel 3.3 Jumlah Peserta Musrenbang Desa Guwosari		
No.	Asal Lembaga	Jumlah (orang)
1.	Perangkat Desa	16
2.	Kepala Dukuh	15
3.	Ketua RT	18
4.	LPMD	9
5.	PKK	3

6.	Karang Taruna	5
7.	Kelompok Tani	2
8.	Kepolisian	2
9.	Tokoh Agama	2
	Jumlah Peserta Musrenbang	72 orang

Sumber : Diolah dari hasil pendataan pelaksanaan kegiatan, 2018

Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan pembangunan desa di Desa Guwosari dapat ditinjau dari keterlibatan dan antusiasme masyarakat untuk menghadiri acara Musrenbangdes serta aktif memberikan masukan atau pendapat dalam perumususan perencanaan program pembangunan pada musyawarah desa yang sedang berlangsung. Sepeti yang dijelaskan oleh pak carik atau Sekdes (Sekertaris Desa) Bapak Muhammad Faza Muzzaki, S.E dalam wawancara 23/08/19 :

“Alhamdulillah saat pelaksanaan Musyawarah Desa partisipasi masyarakat Desa Guwosari lumayan cukup tinggi, dapat dilihat dari kehadiran para undangan yang kami undang pada setiap elemen masyarakat, melalui pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok tani, ternak, kesenian dan lainnya. Disisilain ada kuota diluar undangan yang dipersilahkan hadir untuk warga yang undanganya kami sebar dalam group WA (*Whatsapp*) yang kami beri nama ‘Rembug Warga’ mengikuti zaman dimana warga desa sudah mulai melek teknologi”

Pelaksanaan kegiatan musrenbangdes biasanya dilaksanakan di aula kantor Desa Guwosari. Kepala Desa Masduki Rahmad selalu turun langsung ke dusun-dusun untuk melihat permasalahan yang ada pada setiap warga Desa Guwosari dan sekaligus mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan Desa Guwosari salah satunya adalah musrenbangdes, karena disitu masyarakat akan dituntut untuk berperan aktif menyampaikan segala harapan untkkemajuan Desa Guwosari serta bisa saling mengawasi dalam setiap kebijakan yang nantinya akan direalisasikan.

Gambar 3.4

Musrembang Desa Guwosari



Sumber: Diolah dari data dokumentasi Pemerintah Desa Guwosari

Adapun ada beberapa hal yang disampaikan langsung oleh Kepala Dusun Kembanggede, Bapak Widyanto dalam wawancara 23/08/19 :

“ Walaupun saya baru menjabat kepala Dukuh selama 1 (satu) Tahun, tapi yang saya rasakan selama ini pemerintahan Desa Guwosari dalam setiap kegiatannya sangat baik, selalu responsif dalam setiap usulan-usulan kepala dukuh dalam berbagai permasalahan yang ada pada setiap lapisan masyarakat. Meskipun tidak semua usulan atau gagasan diterima oleh pemerintah desa, karena pastinya pemerintah desa melihat dusun mana yang lebih diprioritaskan untuk program pembangunan demi terciptanya pemerataan, hanya saja masih ada yang memang Pemerintah Desa belum jeli melihat masih ada sebagian wilayah yang harus lebih diperhatikan”

Pendapat yang diiberikan oleh Bapak Wisyanto diatas dapat dilihat bahwa aspirasi dari masyarakat cukup diterima dengan baik oleh pemerintah desa. Pelaksanaan pada materi musrenbangdes disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyusun dan memfasilitasi dokumen RKP Desa yang disusun berdasarkan SK Kepala Desa. Tim tentunya akan me-*review* dokumen-dokumen RPJMDesa dan dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, untuk menganalisis *problem* pada setiap program pemerintahan desa dan penyusunan draft rancangan RKPDesa.

Mendeteksi hal-hal permasalahan pada program tahun lalu haruslah dikaji secara matang dan sinergitas antar pengurus RT yang ada di dusun untuk melihat apa saja yang masih menjadi permasalahan pada setiap dusun. Hal ini selalu menjadi alasan bahwa tidak semua usulan masyarakat diterima karena pertimbangan pembangunan tahun sebelumnya, tetapi juga ini sering menjadi faktor utama dalam pembangunan suatu desa tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat pada umumnya. Hal itu yang biasanya memberikan konsekuensi logis membuat masyarakat enggan menyuarakan aspirasinya yang berbentuk usulan, gagasan dan saran di musyawarah yang di adakan oleh pemerintah Desa. Keadaan ini yang kemudian melahirkan pemikiran pada setiap pemikiran warga bahwa masalah pada forum musrenbang ini kurang akomodatif terhadap setiap usulan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas menjeaskan bahwa dengan bentuk atau pola partisipasi masyarakat yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di antaranya pembambilan keputusan pada seluruh proses kegiatan, yaitu harus adanya keterlibatan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan kebijakan sejak awal proyek perencanaan, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Desa Guwosari. Salah satunya bentuk partisipasi pada tahapan perencanaan partisipasi ini dilakukan oleh seseorang yang tumbuh dengan kesadaran masing-masing untuk ikut serta dalam setiap kegiatan, adapun wujud

partisipasi dapat berupa buah pemikiran, ide-ide dan tanggapan. Sesuai dengan teori dari Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene A.d (2011:61) yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan bermacam-macam, seperti halnya kehadiran rapat, seumbangan pemikiran atau gagasan, berdiskusi dan memberikan tanggapan.

Pada hakikatnya aspirasi memang harus diperjuangkan pemangku kepentingan dalam Musrenbangdes berupa usulan, masukan dan kritikan program pembangunan secara demokratis dan partisipatif. Fakta dilapangan pembangunan yang melalui proses partisipatif adalah dengan adanya usulan dari ringkatan arus paling bawah yaitu dimulai dari RT, Dusun dan Desa. Hasil temuan di Desa Guwosari menunjukkan bahwa aspirasi dari bawah tersebut dapat terakomodasi dengan baik dalam musrenbangdes. Temuan ini tidak sejalan dengan beberapa penilitan yang menyebutkan bahwa musrenbangdes hanya sebagai ajang rutinitas dan seremonial. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan pemerintahan Desa Guwosari dalam menampung seluruh aspirasi masyarakat sekaligus menjadi fasilitator yang mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa Guwosari.

Melihat keadaan tahapan perencanaan tersebut nampaknya pemerintah desa sudah pro aktif kepada masyarakat dengan lebih mendengar suara-suara masyarakat dengan cukup baik. Pemerintah desa dengan transparansi dan akuntabel lebih terbuka kepada seluruh masyarakat dan masyarakat lebih mengetahui informasi secara berkelanjutan mengenai apa saja yang telah direncanakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

2.5 Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan ditingkatan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa itu sendiri, sedangkan pelaksanaan pada program pemerintah pusat yang masuk ke wilayah Desa ditransformasikan kepada pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pembangunan desa

memiliki harapan agar pada setiap diri masyarakat memiliki rasa kepedulan dan rasa saling memiliki atas pembangunan pada setiap daerah, dan meningkatkan nilai-nilai sosial khususnya budaya gotong royong yang melekat masyarakat.

Dengan demikian partisipasi masyarakat menjadi unsur yang harus betul-betul diperhatikan dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu dalam keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, karena masyarakat merupakan objek tujuan utama dalam pelaksanaan arah kebijakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera khususnya di pedesaan. Pelaksanaan pembangunan juga merupakan implementasi dari setiap rangkaian terkait perencanaan program yang tersusun dalam RPJMDes dan RKPDes.

Pada tahap pelaksanaan, pola partisipasi tercermin jelas dalam keterlibatan masyarakat pada program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Guwoari.

3.4.1 Partisipasi dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa dapat dilihat dari kesanggupan warga untuk menyumbangkan tenaga waktu bahkan biaya seperti yang dikemukakan oleh salah satu warga Desa Guvosari yaitu Bapak Padiman berikut wawancara (24/08/19) :

“Pada setiap program pemerintah Desa khususnya pembangunan fisik di dusun, contohnya dalam membangun jalan dan talud sungai, sudah semestinya masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut, ada yang mengorbankan tenaga, waktu bahkan berupa biaya hasil dari iuran warga setempat. Seperti biasa pemerintah dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya partisipatif biasanya dilaksanakan pada saat hari libur kerja atau pada hari minggu”

Masyarakat Desa Guvosari terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, contohnya seperti yang dikatakan bapak padiman

dalam pembuatan jalan talud sungai. Selain dalam bentuk fisik, ada juga masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk uang atau finansial.

a. Pembangunan infrastruktur

Pembangunan Jalan Desa (Timur LP Pajangan) di ruas jalan desa yang sudah mulai rusak. Pembangunan fisik ini tentunya menggunakan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) prakiraan pagu dana sebesar Rp.50.000.000. Hal ini dilakukan guna memperbaiki jalan yang sudah rusak. Hal ini yang menjadikan jiwa dari setiap masyarakat merasa terpanggil dengan sendirinya untuk terlibat dalam pembangunan fisik, mengingat jalan merupakan hal yang paling pokok untuk kenyamanan dan keamanan pengendara jalanan maupun pejalan kaki. Adapun pembangunan talus sungai untuk mencegah adanya banjir di wilayah tertentu yang masih rawan bencana. Ketua RT dusun Watugedug, Bapak Bardi menjelaskan bahwa (wawancara 24/08/19) :

“Jika dilihat keadaan kondisi dusun kami dan sekitarnya, sudah menjadi kewajiban bagi kami selaku masyarakat Desa Guwosari untuk senantiasa bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak, membangun talud sungai untuk mencegah agar tidak terjadi banjir, antisipasi adanya hujan besar dan air meluap dari sungai”

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Bardi tersebut memperlihatkan keprihatinan dari masyarakat itu sendiri jika melihat masih ada jalan yang rusak. Bahkan sesekali masyarakat berinisiatif untuk membetulkan jalan desa secara manual dikarenakan pemerintah belum menyediakan alat berat untuk perbaikan jalan. Gotong royong memang sudah menjadi budaya di Desa untuk saling memberikan rasa kepedulian pada lingkungan.

Partisipasi pembangunan fisik berbeda-beda pada setiap pedusunan, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Lingkungan				
No.	Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Partisipasi Masyarakat
1.	Kembanggede	400m	Perbaikan Infrastruktur	Iuran dana, tenaga dan waktu pada saat kerja bakti.
2.	Watugedug	300m	Mencegah pengikisan pinggiran sungai	Iuran dana, tenaga dan waktu pada saat kerja bakti.
3.	Kentolan Kidul	150m	Perbaikan Infrastruktur	Iuran dana, tenaga dan waktu pada saat kerja bakti.
4.	Dukuh	-	Terpeliharanya Sumber air	Tenaga dan waktu pada saat kerja bakti.
5.	Pringgading	200m	Memperlancar akses Jalan	Iuran dana, tenaga dan waktu pada saat kerja bakti.
6.	Iroyudan	200m	Perbaikan Infrastruktur	Iuran dana, tenaga dan waktu pada saat kerja bakti.
7.	Karangber	400m	Perbaikan Infrastruktur	Iuran dana, tenaga dan waktu pada saat kerja bakti.

Sumber : Data Sekunder RKPDes 2019

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan di pemukiman menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat pada setiap kegiatan kerja bakti. Jiwa sosial untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sangat tinggi. Berikut contoh kegiatan yang dilakukan warga di antaranya membersihkan

rumpun pinggir jalan yang sudah mulai tumbuh, menyediakan pasir dan semen, mengaduk dan mengecor jalan. Kegiatan ini biasa dilakukan pada hari libur kerja agar masyarakat yang bekerja sebagai PNS bisa ikut hadir dalam agenda kerja bakti.

b. Pembangunan drainase (saluran dalam) jembatan Sindon-Santan

Pembuatan drainase menggunakan aliran sumber dana dari ABPDes, pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000 ditambah dengan iuran swadaya masyarakat. Pembuatan drainase ini dilakukan secara gotong royong dengan memanfaatkan tukang yang sudah ahli pada bidangnya. Pembangunan drainase ini untuk mengendalikan air ketika musim hujan dan mencegah kerusakan jalan. Ketika anggaran Dana Desa masih dirasa kurang untuk melakukan pembangunan drainase, warga mulai menunjukkan kepedulian lewat partisipasi dalam bentuk biaya termasuk untuk kebutuhan konsumsi selama pembangunan berlangsung. Seperti yang disampaikan oleh kepala Dusun Pringgading (wawancara 25/08/19) :

“Partisipasi masyarakat sangat terasa ketika warga mulai bergotong-royong bahu-membahu, dengan mengandalkan beberapa tukang batu yang memang sudah menjadi pekerjaannya setiap hari, warga yang lain pun ikut membantu mengerjakan pekerjaan seperti mengangkut tanah, pasir dan lain sebagainya, pada intinya sesuai dengan kemampuan warga yang ingin membantu secara sukarela”

Tradisi gotong royong ini sangat mudah dilakukan di pedesaan karena sudah menjadi kebiasaan pada setiap agenda kerja bakti. Pembangunan drainase yang mendapatkan kucuran dari dana Desa biasanya diberitahu oleh pemerintah desa, kemudian kepala dusun langsung melakukan koordinasi dengan ketua RT setempat untuk mengumumkannya pada warga bahwa akan ada kerja bakti untuk pembangunan drainase, sehingga ketika selembaran undangan kerja bakti warga sudah siap meluncur langsung ke lapangan.

3.4.2 Partisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pengembangan SDM (Sumbe Daya Manusia), salah satunya dalam program pengembangan batik atau lukis kaos. Motif batik asli Guwosari didasari untuk menjaga kelestarian atas kearifan lokal yang berasal dari budaya jawa. Ada pula sub bidang pemberdayaan perempuan melakukamn pelatihan dan pemberdayaan kelompok tani . Adapun beberapa pengembangan Nilai-nilai kebudayaan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah dan seni keagamaan
- b. Pelatihan Karawitan
- c. Penyelenggaraan grebeg selarong

Kegiatan in diungkapkan oleh Kepala Desa Guwosari Masduku Rahmad S.IP menyampaikan bahwa (wawancara 23/08/19) :

“ Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan potensi daerahnya, terutama dalam hal pengembangan diri, maka dari itu pemerintah sering mangadakan pembinaan kepada masyarakat guna terciptanya SDM yang unggul “

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dilakukan Desa Guwosari dalam membantu pembinaan masyarakat pelatihan batik atau lukis kaos melainkan agar masyarakat dapat menciptakan khas batik guwosari yang nantinya dapat menjadi ikon lalu bersaing baik dengan skala nasional ataupun internasional. Ketika banyak pengrajin batik mulai menekuni hal tersebut tentunya secara tidak langsung pendapatan perekonomian masyarakat akan meningkat karena penjualan batik atau lukis kaos yang dipasarkan kepada konsumen.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pembinaan batik / lukis kaos dan pelatihan pemberdayaan kelompok tani Desa Guwosari sangat baik karena masyarakat merasakan manfaat langsung dari keterlibatannya dalam kegiatan tersebut. Dalam Dwiningrum (2015:58) membagi partisipasi menjadi dua bentuk yaitu partisipasi fisik dan non fisik. Mengenai hal ini pengembangan Sumber daya manusia termasuk partisipasi pembangunan non fisik.

2.5 Partisipasi dalam Evaluasi Pembangunan

Dalam isi permendagri No 113 Tahun 2014 mengatakan bahwa evaluasi dilaksanakan setelah pengimplementasian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini bertujuan sebagai bentuk koreksi atau evaluasi program yang ditujukan langsung kepada pemerintah Desa oleh masyarakat Desa Guwosari. Kemudian untuk peningkatan kinerja di periode yang akan mendatang agar lebih baik lagi. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan di Desa Guwosari melibatkan beberapa unsur yang ada yaitu BPD, kepala dusun dan perwakilan rakyat, yang dilaksanakan di pendopo Desa Guwosari. Kemudian masing-masing dari kepala dusun menyampaikan hasil rapat evaluasi kepada seluruh masyarakat di wilayahnya, hal ini bertujuan agar masyarakat di tingkat dusun juga memiliki kesempatan untuk memberikan evaluasi, seperti yang disampaikan oleh Pak widyanto, kepala dusun Kembanggede (wawancara 24/08/29) :

“Proses evaluasi ini dilakukan ditingkat Desa maupun pedusunan. saya selaku kepala dusun memiliki tanggung jawab untuk selalu menyampaikan sejauh mana progres program pemerintah, baik itu masih pembangunan yang masih berjalan atau yang sudah selesai, biasanya saya selalu sampaikan ketika ada kumpulan warga, disitulah peran warga sangat penting karena selalu memberikan masukan dan penilaian terhadap program yang ada. ketua RT

menjadi fasilitator bagi warganya yang ingin memberikan masukan kembali atau bentuk apresiasi terhadap program pemerintah Desa”

Partisipasi masyarakat dalam tahapan evaluasi ini dapat ditinjau dari kesediaan warga untuk memberikan *feedback*, penilaian dan masukan berupa rekomendasi atau mungkin keluhan sekalipun. Dari setiap kritikan dapat kembali meningkatkan kinerja pemerintah desa karena mengandung nilai tentang sejauh mana pencapaian arah pembangunan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Desa Guwosari.

Yadav dalam Theresia (2014:198) menjelaskan bahwa partisipasi dalam evaluasi dan pemantauan pembangunan yaitu dapat berupa pengumpulan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan bertujuan untuk memanfaatkan *output* dari program pada setiap pembangunan. Disini dapat dilihat tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan daerah, apakah sudah sesuai dengan perencanaan diawal atau mungkin belum mencapai sasaran. Dengan kata lain, masyarakat berpartisipasi untuk sama-sama mengevaluasi hasil dari pelaksanaan pembangunan yang dampaknya terasa bagi masyarakat Des guwosari.

Partisipasi masyarakat Desa Guwosari ini tidak lepas dari perbedaan lembaga masyarakat setempat seperti RT-RW, PKK maupun kelompok karang taruna hingga organisasi berbasis warga atau komunitas ditambah dengan kelompok berbasis pekerjaan seperti kelompok tani atau ternak yang ada di Desa Guwosari.

Gambar 3.5

Papan Informasi Pembangunan Jalan Desa

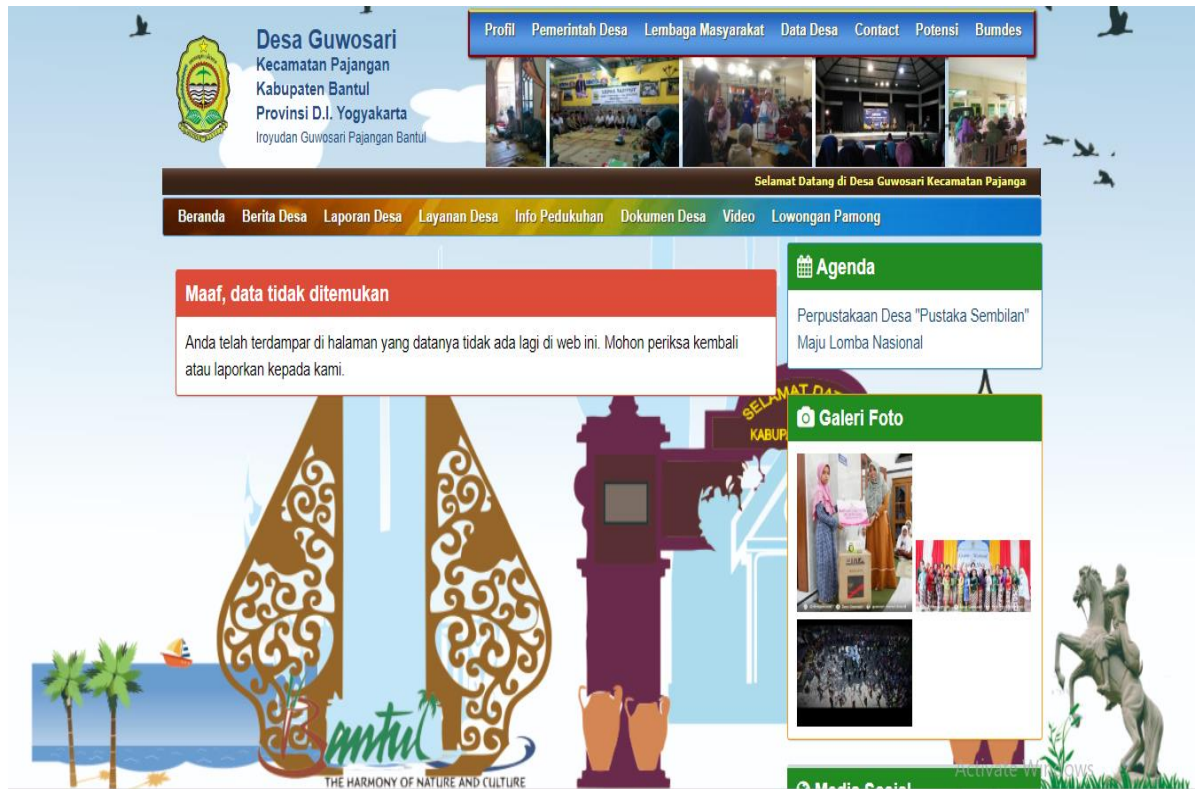


Sumber: diolah dari data dokumentasi, 2019

Bentuk pelaporan pembangunan infrastruktur dengan papan publikasi yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat yang melewati jalan tersebut, terpampang secara jelas bahwa proyek pembangunan program desa sudah terelaksanakan. Masyarakat juga dapat melihat seluruh kegiatan program desa dalam website Desa Guwosari, sebagai berikut :

Gambar 3.3

Website Pemerintahan Des Guwosari



Sumber : Website Pemrintahan Desa Guwosari

Website yang dikelola oleh Desa Guwosari memperlihatkan bahwa publikasi yang ditampilkan dalam website Desa Guwosari masih belum maksimal. Beberapa perangkat desa menjelaskan juga bahwa website masih belum dimanfaatkan dengan baik. BPD selalu bidang struktural tertinggi pun mengatakan bahwa Sistem Informasi Desa dalam bentuk website ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan SDM yang belum mampu untuk mengurus perihal tersebut. Padahal dalam era dizaman serba teknologi ini masyarakat tinggal membuka internet dengan mudah. Menindak lanjuti thal tersebut berikut penjelasan Kepaka Urusan Perencanaan Desa Guwosari, Ibu Miftakhul Khasanah S.Hum (wawancara 25/08/19) :

“ Sejujurnya kami ini ada di masa transisi, dimana semua masih dalam tahapan tertib administrasi, pengumpulan berkas-berkas dari seluruh perangkat desa. Ada yang mengurus langsung dari pamong IT untuk mengurus website Desa, insyaAllah akan kami maksimalkan mengingat itu sebagai pusat informasi bagi masyarakat yang ingin melihat perkembangan desanya “

Ternyata tidak sepenuhnya pengelola website ini salah dalam mengurus informasi di website, melainkan perangkat desa yang lain masih mengurus berkas yang harus dirapihkan dan ditata kembali.

Dari hasil wawancara dengan perangkat desa dan perwakilan masyarakat tersebut memperlihatkan masih banyak keurangan yang menjadikan bahan acuan evaluasi khususnya dalam pembangunan Desa Guwosari. Pertama, partisipasi masyarakat pemerintah desa Guwosari dapat disimpulkan sudah sangat baik, dapat dilihat dari segi proses perencanaan yang melibatkan unsur berbagai elemen masyarakat, Pemerintah Desa Guwosari telah melibatkan semua masyarakat yang ada dan selalu mendukung apa saja yang menjadi penentu arah kebijakan pemerintah Desa.

Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pemngembangan sumber daya manusia Desa guwoasri. Dalam tahapan pembangunan fisik masyarakat sudah banyak dilibatkan, baik itu berupa tenaga, waktu dan biaya. kemudian pada setiap pembangunan fisik atau proyek pembangunan jalan pemerintah selalu memberikan informasi melewati papan publikasi agar diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Guwosari. Kemudian berupa ide dan gagasan masyarakat berperan aktif pada setiap kegiatan pmeberdayaan pemerintah desa baik itu kegiatan kebudayaan maupun kegiatan sosial .

Ketiga, Pengelolaan sistem informasi desa yang masih belum maksimal dikarenakan masih banyaknya data-data yang belum terpublikasikan Hal ini sebagai bentuk pelaporan pemerintah desa pada setiap program desa yang dapat diketahui

langsung oleh masyarakat melalui jejaring internet. Pemerintah Desa memiliki tujuan supaya seluruh program kegiatan lebih transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan.